

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Timbulan sampah menjadi permasalahan global yang membutuhkan perhatian dan intervensi dari seluruh pemangku kepentingan. Sampah menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Pola penanganan sampah yang masih banyak diterapkan di Indonesia yaitu mengumpulkan sampah dari sumber sampah, mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sementara dan berakhir dengan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pola tersebut masih terus dilakukan oleh masyarakat yang memiliki anggapan bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki manfaat sehingga harus dibuang. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK menyatakan bahwa Tahun 2023 jumlah total timbulan sampah nasional tercatat sebanyak 69,9 juta ton (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Indonesia merupakan negara dengan timbulan sampah terbesar di ASEAN. Meningkatnya urbanisasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia akan berdampak pada peningkatan permintaan komoditas, kebutuhan akan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan yang mengakibatkan peningkatan timbulan sampah (UNEP, 2017).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya” (Republik Indonesia, 2008). Warga negara memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Amanat tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Hal tersebut juga sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* nomor 11.1 serta 11.6 yaitu “Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan

dasar serta menata kawasan kumuh” dan “Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota”. Pemerintah berkewajiban menyediakan sistem pengelolaan sampah dalam bentuk infrastruktur serta jasa pengangkutan sebagai urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan tersebar merata, akan memberikan kemudahan bagi warga negara untuk melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan. Salah satu indikator dalam pencapaian SDG's yaitu besarnya jumlah presentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan serta menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat (Bappenas, 2020). Guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu adanya layanan dasar bagi masyarakat dalam bentuk pengelolaan dan pengumpulan sampah (Rodić & Wilson, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menegaskan bahwa kegiatan pengurangan dan penanganan sampah merupakan upaya untuk beralih dari sistem pengelolaan sampah yang konvensional (Republik Indonesia, 2012). Upaya penanganan sampah dapat diterapkan dengan merencanakan dan menyiapkan sarana prasarana pengelolaan sampah berdasarkan pada rencana strategi dan kebijakan yang telah disusun. Sedangkan upaya untuk mencapai pengurangan sampah diwujudkan dalam penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk dapat mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan dan menggunakan sampah yang masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alternatif sehingga mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Kabupaten Sragen berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 941,55 km². Terbagi dalam 20 kecamatan, 208 kelurahan dan 196 desa. Data BPS memproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Sragen meningkat setiap tahunnya. Tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 990.006 jiwa dan meningkat menjadi 997.485 jiwa di Tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2024).

Kawasan perkotaan memiliki tekanan lingkungan tinggi akibat berbagai kegiatan antropogenik dan peningkatan populasi. Pertumbuhan kawasan antropogenik seperti pemukiman, kawasan komersial dan industri akan menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Data DLH Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa total timbulan sampah pada Tahun 2022 sebesar 215.417,33 ton/tahun (Pemerintah Kabupaten Sragen, 2023) dan meningkat menjadi 271.626,52 ton/tahun pada Tahun 2023 (DLH Kabupaten Sragen, 2024). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan beragam jenis model konsumsi masyarakat, maka berkorelasi terhadap meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Diperkirakan beberapa tahun mendatang akan terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup pesat pada wilayah perkotaan di Indonesia yang menyebabkan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga upaya untuk meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan sangat dibutuhkan (Damanhuri & Padmi, 2018).

Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya dalam meningkatkan pengelolaan sampah melalui penyediaan infrastruktur dan berbagai bentuk fasilitas pengelolaan sampah. Kawasan perkotaan Sragen memiliki sarana persampahan berupa 8 unit TPS3R, 1 unit TPST, 1 unit Rumah Kompos/Pusat Daur Ulang, 1 unit alat pirolisis dan 1 Tempat Pemrosesan Akhir/TPA (DLH Kabupaten Sragen, 2024). Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen masih menggunakan pola konvensional dengan pemrosesan akhir berada pada fasilitas *controlled landfill* TPA Tanggan yang berlokasi di Kecamatan Gesi. Timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah perkotaan Sragen tidak sebanding dengan kemampuan layanan persampahan yang dapat diseenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Pengelolaan sampah di negara berkembang menghadapi tantangan utama seperti kurangnya ketersediaan infrastruktur, anggaran yang terbatas, cakupan layanan yang terbatas, rute pengangkutan yang tidak optimal serta penggunaan teknologi dan peralatan yang kurang sesuai, kapasitas TPA yang tidak memadai dan rendahnya pengurangan sampah di sumber (Derdera & Ogato, 2023).

Presentase daerah pelayanan sampah yang dapat dijangkau oleh pemerintah daerah hanya sebesar 13,22% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sragen

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Keterbatasan pendanaan, sumber daya serta ketersediaan sarana prasarana menjadi penyebab cakupan layanan persampahan hanya dilakukan pada 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Sragen, Gemolong, Karangmalang, Masaran, Ngrampal dan Sidoharjo. Rendahnya cakupan layanan persampahan mengakibatkan tingginya jumlah sampah yang tidak terkelola. Prosentase timbulan sampah yang tidak terkelola pada Tahun 2022 mencapai 56,04%, sedangkan timbulan sampah yang mampu dikelola oleh pemerintah daerah hanya sebesar 43,96% (Pemerintah Kabupaten Sragen, 2023). Sankoh, dkk (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa sampah rumah tangga yang tidak dikelola dan terbuang ke lingkungan dapat berbahaya terhadap kesehatan dan menyebabkan penyebaran penyakit menular (Taweesan dkk., 2017). Tingginya prosentase jumlah sampah yang tidak dikelola sesuai ketentuan dapat menjadi sumber pencemar akibat proses pelindian dan pelepasan gas metan (CH_4) ke udara yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Terdapat 5 (lima) aspek penting yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia Nomor 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman yaitu aspek regulasi/peraturan, pembiayaan, kelembagaan, teknis operasional serta peran masyarakat. Sebagai bentuk kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sragen menginisiasi payung hukum khusus dengan mengesahkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2023 yang secara substantif mengatur tata kelola persampahan. Peraturan ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sragen dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dari hulu hingga ke hilir. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur persampahan, melakukan pembinaan dan pengawasan serta menyusun perencanaan dalam mengoptimalkan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah. Sedangkan masyarakat dapat berperan dalam memberikan saran dan usulan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan berpartisipasi dalam mengelola sampah yang dihasilkan. Damanhuri dan Padmi (2011) menyatakan bahwa dalam pengelolaan terdapat aspek nonteknis, meliputi cara mengelola, membiayai dan melibatkan masyarakat sebagai penghasil limbah

agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara langsung maupun tidak langsung. (Suryani, 2022).

Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, namun juga masyarakat sebagai penghasil sampah. Diperlukan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah, sehingga mengurangi timbulan sampah yang terbuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Salah satu konsep yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse dan recycle*). Dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan dan terintegrasi diperlukan kerjasama publik melalui kesadaran masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif. Partisipasi dari masyarakat akan membantu dalam menjaga kebersihan kota dan mempercepat pemulihan sumber daya sebab sampah telah dipilah dari sumber (Shekdar, 2009). Berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai penghasil sampah. Kondisi sosiokultural menjadi tantangan dalam tata kelola karena persepsi dan kesadaran lingkungan masyarakat belum optimal, sehingga menyulitkan dalam penegakan hukum bagi pelanggar lingkungan (DLH Kabupaten Sragen, 2024).

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi tantangan terbesar guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Masjhoer dkk., 2022). Terdapat beberapa faktor paling berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat antara lain peran pemerintah dan tokoh masyarakat serta pemahaman individu yang dapat mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengelola sampah (Hazah dkk., 2022). Sosialisasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat sehingga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah (Xiao dkk., 2017).

Kecamatan Sragen merupakan ibu kota kabupaten yang memperoleh layanan pengangkutan dan pengumpulan sampah dari pemerintah daerah. Salah satu upaya dalam mencapai target SDG's yaitu mengurangi dampak lingkungan melalui penanganan sampah kota yaitu dengan mewujudkan sistem pelayanan pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk

menganalisis kinerja sistem layanan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah ibu kota Kabupaten Sragen, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan layanan pengelolaan persampahan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul pertanyaan yang akan dirumuskan dalam penelitian, sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen?
- b. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sragen?
- c. Bagaimana persepsi dan harapan masyarakat terhadap kualitas kinerja layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Sragen?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang disampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis sistem layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen.
- b. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sragen dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang dihasilkan.
- c. Menganalisis persepsi dan harapan masyarakat terhadap kinerja layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Sragen

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

- a. Dalam bidang akademis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan lingkungan dan pengelolaan sampah perkotaan.
- b. Manfaat praktis yaitu memberikan informasi kepada semua pihak tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

- c. Memberi masukan kepada pemerintah daerah selaku penyelenggara layanan persampahan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan sistem layanan persampahan di Kabupaten Sragen.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara umum menganalisis mengenai layanan sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Sragen. Pengamatan terhadap sistem pengelolaan sampah dibatasi hanya pada aspek teknis layanan pengelolaan sampah serta bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang dihasilkan. Responden yang digunakan merupakan masyarakat yang tinggal pada 6 Kelurahan di Kecamatan Sragen yang memperoleh layanan pengumpulan sampah dari pemerintah daerah.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kinerja layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen dilaksanakan untuk menganalisis kinerja sistem pengelolaan sampah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya di wilayah Ibu Kota Kabupaten Sragen yang memperoleh layanan pengumpulan sampah dari Pemerintah Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan sistem dan layanan kinerja pengelolaan sampah disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan	Relevansi
1	Achara Taweesan, Thammarat Koottatep, Chongrak Polprasert, 2017	Effective Measures for Municipal Solid Waste Management for Cities in Some Asian Countries	Fokus dan tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap praktik pengelolaan sampah di 80 kota di negara Malaysia, Nepal dan Thailand dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian	Menganalisis kepuasan warga negara terhadap praktik pengelolaan sampah perkotaan serta menganalisis faktor yang paling berpengaruh

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan	Relevansi
			menunjukkan bahwa analisis terhadap indikator pengumpulam, pengolahan, pembiayaan dan kepuasan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum memuaskan dengan faktor yang paling berpengaruh yaitu kurangnya armada pengangkutan dan teknologi pengolahan.	
2	Abdul Mukhit (2019)	Strategi Peningkatan Layanan Persampahan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal	Penelitian ini memiliki tujuan dalam melakukan evaluasi layanan pengelolaan sampah perkotaan dan menganalisis peran serta masyarakat menggunakan tangga partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan sistem layanan persampahan masih menggunakan pola kumpul angkut buang dengan standar pelayanan minimal sebesar 50% serta tingkat peran serta masyarakat dalam kategori sedang	Menganalisis sistem layanan pengelolaan sampah perkotaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah serta menganalisis partisipasi masyarakat menggunakan tangga partisipasi Arnstein
3	Jussac Maulana Masjhoer,	Rural Waste Management System in Southern	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan	Analisis sistem pengelolaan sampah dilakukan pada 3

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan	Relevansi
	Syafrudin, Maryono (2022)	Zone of Gunungkidul Regency	terhadap 5 sistem pengelolaan sampah meliputi aspek peraturan, kelembagaan, pembiayaan, teknis operasional dan partisipasi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Gunung Kidul	aspek yaitu teknis operasional, kelembagaan dan partisipasi masyarakat
4	Hazah, Hutwan Syarifuddin, Ernawati Hd, 2022	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Melakukan identifikasi terhadap partisipasi dan persepsi masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga di Kecamatan Tungkal Ilir, menggunakan metode kuantitatif yaitu distribusi frekuensi dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, peran tokoh masyarakat dan persepsi masyarakat berpengaruh terhadap partisipasinya dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang dihasilkan	Penggunaan analisis distribusi frekuensi untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
5	Tri Dianita, Heni Fitriani, Puteri Kusuma	Analisis Perbaikan Sistem Kinerja Pengelolaan	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi	Penggunaan metode <i>Importance Performace Analysis</i> (IPA)

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan	Relevansi
	Wardhani, 2024	Sampah di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan	kinerja pengelolaan sampah menggunakan metode <i>Importance Performace Analysis</i> (IPA) dan <i>Preference Selection Index</i> (PSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan layanan yang harus dilakukan antara lain kurangnya peralatan operasional sistem pengangkutan dan pengolahan sampah.	untuk menganalisis terkait persepsi dan harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja layanan pengelolaan sampah

Sumber : Data diolah (2025)

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait persampahan menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dan layanan di bidang pengelolaan sampah. Faktor persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan dapat mempengaruhi niat untuk turut serta dan berkontribusi dalam melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan. Sedangkan faktor ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai mengakibatkan belum maksimalnya kinerja layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sekolah Pascasarjana